

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1 Karakteristik Geografis Kabupaten Bojonegoro

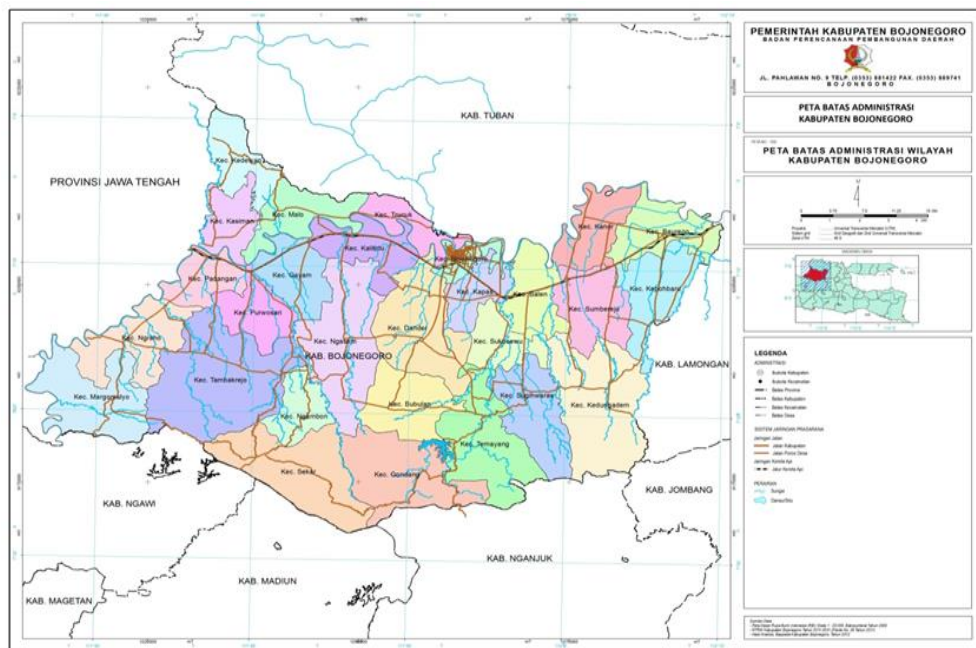
Kabupaten Bojonegoro secara astronomis terletak pada $6^{\circ}59'$ - $7^{\circ}37'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}25'$ - $112^{\circ} 09'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro mencapai $2307,06 \text{ Km}^2$. Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh aliran sungai terpanjang di pulau Jawa yakni Sungai Bengawan Solo yang juga menjadi batas natural antara provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Aspek geografis lainnya Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh pegunungan kapur. Di sebelah Utara dan Selatan Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh pegunungan kapur yang merupakan rangkaian dari pegunungan Kendeng, Gunung Pandan, kramat, dan Gajah serta ditengah wilayah dipisahkan oleh Sungai bengawan Solo. Dengan keadaan geografis tersebut maka komoditas di Kabupaten Bojonegoro diantaranya kegiatan pertanian, pada cuaca penghujan ditanami padi dan pada cuaca kemarau kegiatan pertanian cenderung menghasilkan tembakau, hasil kehutanan, pertambangan dan potensi cadangan minyak gas bumi 20% nasional berada di Kabupaten Bojonegoro.

2.1.2. Wilayah Administratif

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan 5 wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban
- Sebelah Selatan : Kabupaten Nganjuk, Madiun dan Jombang
- Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

Gambar 1 Peta Administratif Kabupaten Bojonegoro



Sumber : RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018

Luas Wilayah keseluruhan Kabupaten Bojonegoro adalah 2.307,06 Km² yang terdiri dari 28 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Tambakrejo seluas 209,52 Km² dengan presentase terhadap luas kabupaten sebesar 9,08 % luas sedangkan kecamatan dengan luas terendah adalah Kecamatan Bojonegoro

dengan presentase terhadap luas kabupaten sebesar 1,01 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Margomulyo	139,68	6,05
2	Ngraho	71,48	3,10
3	Tambakrejo	209,52	9,08
4	Ngambon	48,65	2,11
5	Sekar	130,24	5,65
6	Bubulan	84,73	3,67
7	Gondang	107,01	4,64
8	Temayang	124,67	5,40
9	Sugihwaras	87,15	3,78
10	Kedungadem	145,15	6,29
11	Kepohbaru	79,64	3,45
12	Baureno	66,37	2,88
13	Kanor	59,78	2,59
14	Sumberrejo	76,58	3,32
15	Balen	60,52	2,62
16	Sukosewu	47,48	2,06
17	Kapas	46,38	2,01
18	Bojonegoro	25,71	1,11
19	Trucuk	36,71	1,59
20	Dander	118,36	5,13
21	Ngasem	147,21	6,38
22	Kalitidu	65,95	2,86
23	Malo	65,41	2,84
24	Purwosari	62,32	2,70
25	Padangan	42	1,82
26	Kasiman	51,8	2,25
27	Kedewan	56,51	2,45
28	Gayam	50,05	2,17
	Total	2.307,06 Km²	100 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro tahun 2013

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro secara total adalah 1.307.269 penduduk per tahun 2016 dan kepadatan penduduk total sebesar 20.209 per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Bojonegoro sebesar 3309 per km² dan kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Margomulyo sebesar 161 per Km². Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
1	Margomulyo	139,68	8157	22.527	161
2	Ngraho	71,48	15.698	46.080	645
3	Tambakrejo	209,52	19.398	53.938	257
4	Ngambon	48,65	4356	11.611	239
5	Sekar	130,24	10.586	27.602	212
6	Bubulan	84,73	5548	14.764	174
7	Gondang	107,01	9576	25.149	235
8	Temayang	124,67	13.598	36.642	294
9	Sugihwaras	87,15	16.824	46.504	534
10	Kedungadem	145,15	28.743	82.776	570
11	Kepohbaru	79,64	22.244	65.548	823
12	Baureno	66,37	25.826	81.373	1226
13	Kanor	59,78	21.067	60.627	1014
14	Sumberejo	76,58	26.206	71.129	929
15	Balen	60,52	23.431	66.197	1094
16	Sukesewu	47,48	16.052	43.289	912
17	Kapas	46,38	18.220	54.844	1182
18	Bojonegoro	25,71	30.642	85.066	3309
19	Trucuk	36,71	13.981	38.758	1056
20	Dander	118,36	29.591	81.867	692
21	Ngasem	147,21	22.420	58.999	401
22	Gayam	50,05	11.595	32.115	642
23	Kalitidu	65,95	17.791	49.787	755
24	Malo	65,41	10.699	31.076	475
25	Purwosari	62,32	10.802	29.975	481

26	Padangan	42,00	16.062	44.392	1057
27	Kasiman	51,80	10.575	31.441	607
28	Kedewan	56,51	4501	13.193	233
	Bojonegoro	2.307,06	464.189	1.307.269	20.209

Sumber : BPS Kab.Bojonegoro, 2017

2.1.3.2 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data Badan pusat Statistik di tahun 2008 kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro terbilang parah dan menempati urutan 10 besar kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Namun Dalam kurun waktu 2013-2018 tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro sedikit mengalami penurunan dan berhasil keluar dari peringkat kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur seperti pada penjelasan tabel dibawah.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin tahun 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Dalam persen (%)	16,02	15,48	15,71	14,60	14,34
Dalam ribu jiwa (000)	196,80	190,90	193,99	180,99	178,25

Sumber : Susesnas BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur selama

2.1.4. Aspek Pemeritahan

2.1.4.1. Jumlah Kecamatan, Desa dan RT / RW

Berdasarkan regulasi terbaru, Peraturan daerah No.22 tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai latar belakang yaitu menunjang pengembangan perekonomian di wilayah ring I migas Blok Cepu serta dilatarbelakangi oleh pertumbuhan peningkatan jumlah penduduk, proposi jumlah desa, dan peningkatan pelayanan publik sehingga Wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro yang sebelumnya terdiri dari 27 Kecamatan kini bertambah 1 kecamatan baru hasil pemekaran yaitu Kecamatan Gayam terdiri dari 12 desa sehingga total terdapat 28 Kecamatan dengan 419 Desa, 11 Kelurahan, 7675 Rukun Tetangga (RT) dan 2017 Rukun Warga (RW). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Jumlah Kecamatan, desa RT/RW di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Dusun	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1	Margomulyo	6	41	105	42
2	Ngraho	16	58	318	131
3	Tambakrejo	18	65	357	89
4	Ngambon	5	16	66	23
5	Sekar	6	35	155	60
6	Bubulan	5	17	86	25
7	Gondang	7	32	166	45
8	Temayang	12	37	154	37
9	Sugihwaras	17	55	287	88

10	Kedungadem	23	95	586	164
11	Kepohbaru	25	76	438	102
12	Baureno	25	89	462	165
13	Kanor	25	59	408	97
14	Sumberejo	26	83	430	99
15	Balen	23	57	430	80
16	Sukezewu	14	42	288	53
17	Kapas	21	43	309	42
18	Bojonegoro	18	14	357	59
19	Trucuk	12	27	184	31
20	Dander	16	44	366	69
21	Ngasem	17	56	348	96
22	Gayam	12	38	200	61
23	Kalitidu	18	45	289	79
24	Malo	20	52	230	101
25	Purwosari	12	31	201	61
26	Padangan	16	38	207	59
27	Kasiman	10	30	179	41
28	Kedewan	5	12	69	18
	Kab. Bojonegoro	430	1287	7675	2017

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2017

2.1.4.2. Jumlah Instansi Badan / OPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan peraturan Daerah no. 13 Tahun 2016 terdapat lembaga daerah diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 29 Dinas, 4 Badan Publik diantaranya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan 28 Kecamatan diseluruh Kabupaten Bojonegoro.

2.2. Penjelasan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, Selama 5 tahun pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai Visi-misi yaitu

Visi : Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung pangan dan energi negeri yang produktif, berdaya saing, adil, sejahtera, bahagia dan berkelanjutan.

Adapun penjelasan atas visi tertera dalam tabel berikut

Tabel 5 Perumusan Penjelasan Visi RPJMD 2013-2018

VISI :		
“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, BerdayaSaing, Adil,Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”		
NO	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1	BOJONEGORO, LUMBUNG PANGAN NEGERI	Bermakna bahwa Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan.

2	BOJONEGORO, LUMBUNG ENERGI NEGERI	Bermakna bahwa Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan di Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan modal dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.
3	PRODUKTIF	Bermakna bahwa setiap sector kegiatan di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Meskipun sektor migas Bojonegoro menjadi andalan Nasional dan memberi sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro, namun sektor – sektor lain seperti sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan perusahaan; serta jasa-jasa harus mendapatkan perhatian secara serius untuk bisa dipacu produktivitasnya dalam rangka meningkatkan pondasi perekonomian masyarakat Bojonegoro.
4	BERDAYA SAING	Bermakna mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas

		yang tinggi dengan demikian setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional. Dengan berdaya saing, diharapkan Bojonegoro memiliki keunggulan kompetitif untuk memproduksi pangan, energi, jasa, perdagangan, dan industri.
5	ADIL	Bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan seimbang dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat berlandaskan penerapan norma dan hukum.
6	SEJAHTERA	Bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan pemenuhan hak /pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sehingga setiap kegiatan dan produk pelayanan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sejahtera secara materiil dan non-materiil.
7	BAHAGIA	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dengan memiliki suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan ketenangan, kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, komunikasi, hubungan dan interaksi sosial, kebudayaan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religius, pekerjaan dan penghasilan yang

		layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Bojonegoro menjadi manusia yang produktif.
8	BERKELANJUTAN	Bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan dilaksanakan dengan mengelola sumberdaya yang ada secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Setiap tahapan pembangunan yang dilakukan akan memberikan pondasi dan kekuatan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan kata lain pembangunan daya tahan dan daya saing, terutama aspek sumber daya manusia, lingkungan hidup, modal sosial dan kehidupan demokratis.

Misi :

Tabel 6 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Tahun 2013-2018

VISI :		
“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”		
NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan	Bermakna meningkatnya perkembangan ekonomi daerah secara konsisten meningkat yang didukung mantapnya infrastruktur dasar, modal sosial dan meningkatnya kualitas lingkungan

	berkelanjutan melalui peningkatan industri pangan dan energi;	dengan memberdayakan potensi daerah yang difokuskan pada peningkatan bidang industri pangan dan energi yang berdaya saing
2	Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	Bermakna meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses pendidikan, kualitas derajat kesehatan, masyarakat yang kompetitif, produktif guna meraih kemandirian dan kesejahteraan
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional.	Bermakna peningkatan kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, direct dan dialogis.

Terdapat pada misi pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 pada misi poin ketiga bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang professional dan terdapat kesamaan antara tujuan yang akan atau hendak dicapai dengan keterbukaan pemerintah yaitu mewujudkan pemerintah yang transparan akuntabel efisien dan efektif.

2.3. Peraturan Bupati Bojonegoro No.30 Tahun 2013 tentang Manajemen Pembangunan berbasis Partisipasi Publik

Peraturan Bupati Bojonegoro No.30 Tahun 2013 tentang Manajemen Pembangunan berbasis partisipasi publik pada pasal 3 bertujuan memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berperan serta ikut aktif dalam pembangunan.

Adapun Tujuan dari regulasi peraturan Bupati Bojonegoro No.30 Tahun 2013 diantaranya :

1. Sebagai Sarana Pemerintah Daerah untuk mendapatkan masukan berupa aspirasi dari masyarakat, yang menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, dan kemudian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Mengorganisir dan mengklasifikasi kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sehingga mampu menciptakan inovasi dan melahirkan solusi dalam pembentukan kebijakan yang dibutuhkan.
3. Sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna meningkatkan kinerja dalam tata kelola pemberdayaan dan pelayanan publik yang benar.
4. Meningkatkan kualitas masyarakat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam segala dimensi yang

mencukupinya untuk kemudian mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak atas pelaksanaannya.

Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis partisipasi publik secara pelaksanaan harus memenuhi Azas berdasarkan Perbup Bojonegoro No.30 Tahun 2013 diantaranya adalah :

1. Kepentingan Umum;
2. Kepastian Hukum;
3. Keseimbangan antara hak dan Kewajiban;
4. Partisipatif
5. Profesionalitas;
6. Persamaan dalam perlakuan (Tidak diskriminatif);
7. Keterbukaan / Openness;
8. Akuntabilitas;
9. Ketepatan Waktu;
10. Kecepatan, Kemudahan dan keterjangkauan.

Untuk menunjang tujuan sesuai dengan perbup No.30 Tahun 2013 maka dibutuhkan sumber atau media sebagai penyalur aspirasi dan ide selanjutnya adalah sumber perencanaan atau ide, aspirasi melalui saluran media diantaranya berdaasrkan pasal 6:

1. SMS Center Pemkab pada bagian Humas Pemkab Bojonegoro;

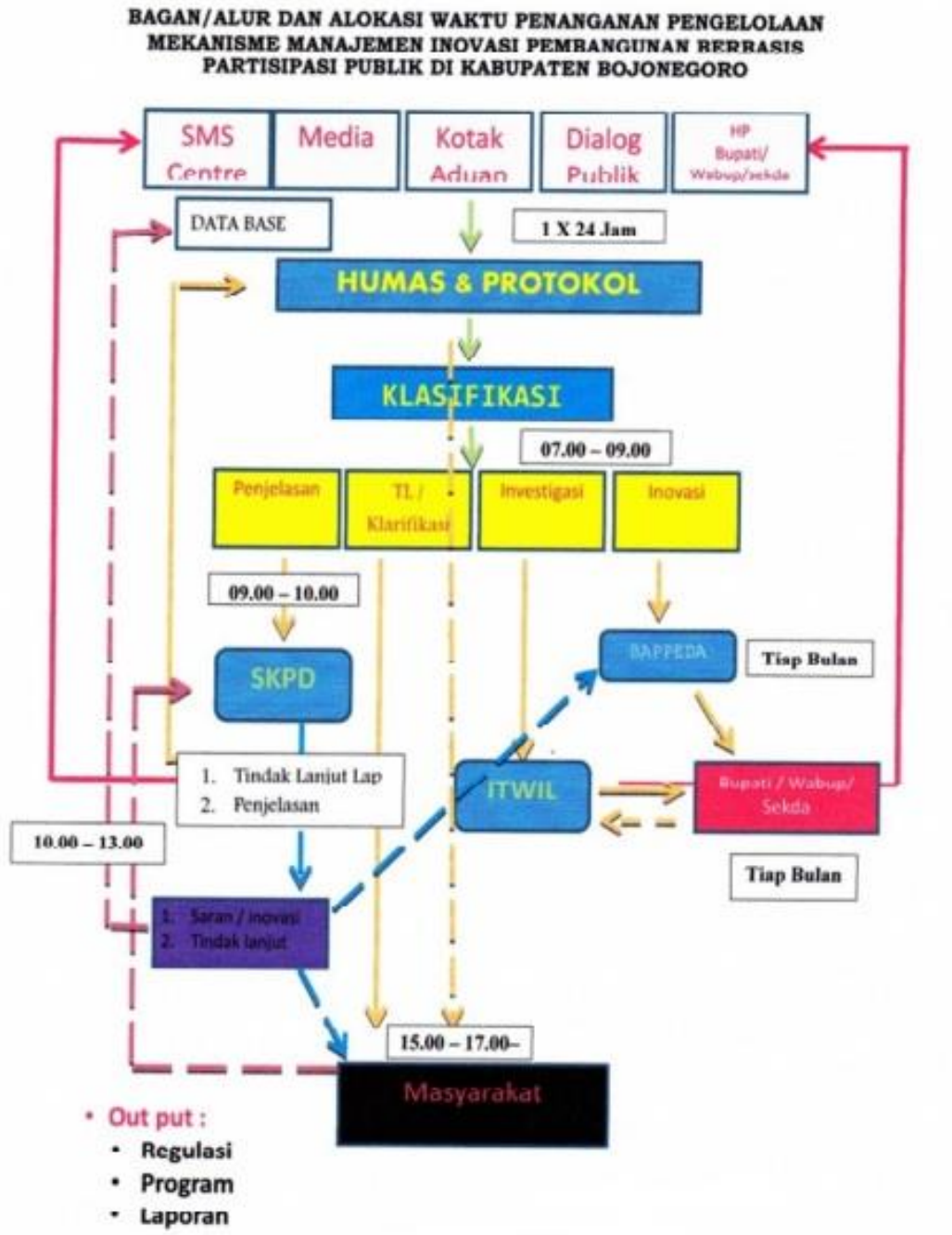
2. Dialog Publik;
3. Surat Keluhan Masyarakat;
4. Surat dari media cetak maupun elektronik, LPPL Radio Malowopati
5. Kotak Saran dari masing masing SKPD
6. SMS dan telpon pejabat

Untuk menjawab berbagai media dalam memasukan sumber ide gagasan, kritikan aduan, laporan dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah kabupaten Bojonegoro maka dibentuklah tim pengelola berdasarkan struktur organisasi diantaranya terdapat dalam pasal 9 perbup No.30 Tahun 2013 :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris daerah
3. Kepala Bagian Humas dan protocol secretariat daerah
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Bagian umum dan keuangan Sekretariat daerah
6. Direktur LLPL Radio Malowopati
7. Kepala SKPD dan BUMD terkait.

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 7 lampiran perbup no.30 tahun 2013 mengenai alur alokasi waktu penanganan pengelolaan manajemen inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik.

Gambar 2 Alur Penanganan Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik



Sumber : Lampiran Perbup No.30 Tahun 2013, 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro No.30 Tahun 2013, Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat kabupaten Bojonegoro :

1. Sumber Ide ditampung pada server tim pengelola untuk kemudian dilakukan pemilahan / klasifikasi oleh operator pemilah.
2. Dalam aduan, gagasan atau ide yang masuk merupakan kriteria yang tidak membutuhkan penjelasan teknis/klarifikasi lebih lanjut maka tim pengelola menindaklanjutinya dengan menyusun jawaban yang disampaikan kepada masyarakat
3. Dalam aduan, gagasan, laporan, ide yang masuk merupakan kriteria yang membutuhkan jawaban penjelasan teknis atau klarifikasi lebih lanjut maupun dapat dijadikan bahan perencanaan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah maka, tim pengelola menindaklanjutinya kepada SKPD atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti melalui media surat elektronik.
4. Semua Jenis laporan aspirasi masyarakat yang masuk membutuhkan penyelidikan atau investigasi lebih lanjut maka diteruskan ke SKPD pengelola yaitu Bappeda untuk dijadikan bahan temuan dan disampaikan kepada Bupati
5. Tim pengelola, memberi jawaban akhir untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat berdasarkan jawaban dari SKPD / BUMD Terkait

6. Untuk hal penanganan terkait penanganan kompleks atau lintas instansi maka memerlukan koordinasi antar skpd dan waktu penyelesaian disesuaikan dengan penanganannya.

Mengenai tindak lanjut terdapat beberapa penjelasan diantaranya :

1. Tindak lanjut atau klasifikasi dilaksanakan oleh masing masing OPD atau BUMD Terkait dan Bappeda Kabupaten Bojonegoro
2. Bappeda Kabupaten Bojonegoro menjadi leading sector penyusunan rencana pembangunan di daerah dengan memanfaatkan sumber ide dari pasal 7 diantaranya perubahan lingkungan strategis, kritik keluhan, aduan pertanyaan masyarakat melalui berbagai media, no.hp pejabat terkait, sms center, email, surat pembaca media massa, aspirasi melalui dialog publik, radio, dan sumber ide lainnya.
3. Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di daerah Bappaeda Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan OPD dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahap evaluasi dan pelaporan terdapat minimal 1 kali dalam setahun untuk laporan dievaluasi bersama dan hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan perubahan kebijakan dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.